

Pasien Anak di RS New York AS Naik Imbas Kasus Omicron

NEW YORK (IM)-Departemen Kesehatan Negara Bagian New York, Amerika Serikat, melaporkan peningkatan jumlah rawat inap anak-anak di rumah sakit terkait Covid-19. Hal ini terjadi di tengah kemunculan varian Omicron. “(Di New York City) mengidentifikasi peningkatan empat kali lipat rawat inap rumah sakit Covid-19 untuk anak-anak berusia 18 tahun ke bawah mulai minggu 5 Desember hingga pekan ini,” ujar Depkes New York dalam pernyataan resmi seperti dikutip AFP, Minggu (27/12). Sekitar setengah dari jumlah rawat inap di RS, berusia lima tahun ke bawah. Kelompok ini tak memenuhi syarat untuk divaksinasi. Amerika Serikat kemudian buru-buru menggelar tes Covid-19 di tengah lonjakan varian Omicron dan perayaan liburan yang meningkatkan mobilitas masyarakat. Namun, tes itu tak tersedia di banyak lokasi. Pakar kesehatan sekaligus penasihat pandemi Covid-19 Amerika Serikat, Anthony Fauci, berjanji akan menambah lokasi tes Covid-19. “Salah satu masalahnya adalah tak akan sepenuhnya tersedia bagi semua orang sampai Januari dan masih ada beberapa masalah sekarang sola orang-orang yang kesulitan untuk tes,” kata Fauci kepada ABC News. Ia mengaku tengah menangani masalah terkait tes Covid-19 itu, dan berjanji akan segera melakukan perbaikan. Di hari sebelumnya, Fauci juga menekankan varian Omicron sangat menular. Merujuk pada studi baru dari Afrika Selatan, fauci mengatakan varian Omicron cenderung menyebabkan rawat inap yang lebih singkat. Meski demikian, ia juga memperingatkan tingkat keparahan Omicron yang disebut lebih rendah, bergantung pada seberapa cepat penyebarannya. “Masalahnya kami tak ingin berpuas diri bahwa saat Anda punya volume infeksi yang tinggi, mungkin mengesampingkan rendahnya tingkat keparahan,” kata Fauci. ● gul

Putin Teken RUU yang Larang Adanya Presiden Lain di Rusia

MOSKOW (IM)-Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyetujui undang-undang yang secara resmi mengakhiri keberadaan “presiden” lain di dalam negeri, mengakhiri perselisihan hukum yang telah berlangsung lama. Sejak 1991 dan jatuhnya Uni Soviet, kepala Republik Tatarstan, sebuah wilayah di Rusia Eropa, telah disebut sebagai presidennya. Republik Tatarstan adalah satu-satunya bagian Rusia yang memberikan gelar Presiden kepada pemimpin regionalnya. Gelar ini telah menjadi penyebab perselisihan antara Moskow dan Kazan, Ibu Kota Republik Tatarstan. Dengan disahkannya undang-undang ini, Tatarstan diberi waktu hingga Juni 2022 untuk mengganti gelar pimpinan regional tersebut. Gelar jabatan pejabat tertinggi dari subjek Federasi Rusia adalah “kepala,” demikian tertulis dalam undang-undang baru itu sebagaimana dilansir RT. Gelar seperti itu tidak boleh mengandung kata dan frasa yang merupakan gelar kepala negara, Presiden Federasi Rusia. Sengketa penamaan antara Moskow dan Kazan telah berlangsung selama bertahun-tahun dan mulai menjadi lebih menonjol pada 2017, ketika perjanjian Tatarstan tentang otonomi berakhir. Wilayah tersebut mengklaim bahwa, karena Rusia adalah sebuah federasi, setiap subjek memiliki hak untuk memilih nama pemimpinnya sendiri. Sekarang, meskipun Dewan Negara Tatarstan memberikan suara menentang RUU tersebut, wilayah otonomi itu akan dipaksa untuk melakukan perubahan. RUU itu harus disetujui oleh setidaknya dua pertiga dari 85 entitas konstituen Rusia, tetapi ditentang oleh Kazan. Menurut pendapat Albert Khabibullin, seorang politisi senior Tatar, ketentuan khusus dari undang-undang yang diperkenalkan “bertentangan dengan dasar-dasar tatanan konstitusional Rusia sebagai negara federasi demokratis yang diatur oleh supremasi hukum.” Pada 1990-an, banyak kepala daerah lainnya juga disebut presiden, termasuk Yakutia, Chechnya, Dagestan, dan Udmurtia. ● ans



PENYEBARAN VIRUS KORONA OMICRON DI AS

Warga mengantri untuk melakukan tes COVID-19 di Times Square saat varian virus korona Omicron terus menyebar di Manhattan, New York, Amerika Serikat, Minggu (26/12).

PBB Geram dengan Pembantaian 35 Warga Sipil di Myanmar

Dua staf Save the Children di Myanmar dilaporkan masih belum ditemukan.

NEW YORK CITY (IM)- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merasa ngeri dengan laporan kredibel yang menyebut sedikitnya 35 warga sipil di Myanmar tewas dibunuh dan jenazah mereka hangus dibakar. PBB menuntut pemerintah Myanmar untuk menyelidiki kematian puluhan warga sipil tersebut.

Seperti dilansir AFP, Senin (27/12/2021), dua pekerja organisasi non-profit, Save the Children, dilaporkan hilang setelah kendaraan mereka, bersama sejumlah kendaraan lainnya, diserang dan dibakar dalam insiden di wilayah Kayah. Kedua pekerja itu

hilang saat dalam perjalanan pulang usai melakukan tugas kemanusiaan.

Sebuah kelompok pemantau dan media lokal menyebarkan serangan itu terhadap tentara militer Myanmar.

“Saya mengutuk insiden menyedihkan ini dan semua serangan terhadap warga sipil di seluruh negeri,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan Martin Griffiths dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Senin (27/12). Dia menyerukan penyelidikan menyeluruh dan transparan.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta Febru-

ari. Menurut kelompok pemantau lokal, lebih dari 1.300 orang tewas dalam tindakan keras oleh pasukan keamanan junta. Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) telah bermunculan di seluruh negeri untuk melawan junta, dan telah menarik militer ke dalam kebuntuan berdarah dalam bentrokan dan pembalasan. Pada hari Sabtu, foto-foto muncul di media sosial yang dimaksudkan untuk menunjukkan dua truk yang terbakar dan sebuah mobil di jalan raya di kota Hpruso di negara bagian Kayah, dengan sisa-sisa jasad manusia hangus di dalamnya.

Seorang anggota kelompok PDF lokal mengatakan para milisinya telah menemukan kendaraan itu Sabtu pagi atau pada Hari Natal. Sebelumnya dia mendengar militer telah menghentikan beberapa kendaraan di Hpruso setelah bentrokan dengan para milisi PDF di dekat lokasi serangan itu pada hari Jumat. “Ketika kami pergi untuk memeriksa di daerah pagi ini, kami menemukan mayat dibakar di dua truk. Kami menemukan 27 mayat,” katanya kepada AFP tanpa menyebut namanya. “Kami menemukan 27 tengkorak,” kata saksi lain yang tidak mau disebutkan namanya, dan mengatakan ada mayat lain yang tidak bisa dihitung. Save the Children mengatakan pada Sabtu malam bahwa dua staf Myanmar mereka telah “terjebak” dalam insiden itu dan hilang. Keduanya telah melakukan perjalanan pulang setelah melakukan pekerjaan kemanusiaan di wilayah tersebut. Setelah kejadian tragis itu, mereka memilih menangguk pekerjaan di beberapa

wilayah. Junta Myanmar sebelumnya mengatakan pasukannya telah diserang di Hpruso pada hari Jumat setelah mencoba menghentikan tujuh mobil yang dikemudikan dengan cara yang mencurigakan.

“Pasukan telah membunuh sejumlah orang dalam bentrokan berikutnya,” juru bicara junta, Zaw Min Tun, kepada AFP, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Kelompok pemantau The Myanmar Witness mengatakan telah mengonfirmasi laporan media lokal dan laporan saksi dari milisi lokal bahwa 35 orang termasuk anak-anak dan wanita dibunuh dan dilaporkan oleh militer pada 24 Desember di kota Hpruso. Menurut kelompok itu, data satelit juga menunjukkan kebakaran terjadi sekitar pukul 13.00 siang pada hari Jumat di Hpruso. ● tom

Terpetasi Taliban tentang jilbab—jilbab dapat berkisar dari penutup rambut hingga cadar atau penutup seluruh tubuh—tidak jelas, dan mayoritas wanita Afghanistan sudah mengenakan jilbab. Sejak mengambil alih kekuasaan pada Agustus, Taliban telah memberlakukan berbagai pembatasan pada wanita dan anak perempuan, meskipun menjanjikan aturan yang lebih lunak dibandingkan dengan aturan mereka saat berkuasa pada 1990-an. Di beberapa provinsi, otoritas Taliban sempat telah dibujuk untuk membuka kembali sekolah—tetapi banyak anak perempuan masih terputus dari pendidikan menengah. Awal bulan ini, otoritas Taliban mengeluarkan dekret atas nama pemimpin tertinggi mereka yang memerintahkan pemerintah untuk menegakkan hak-hak perempuan. Keputusan itu tidak menyebutkan akses anak perempuan ke pendidikan. ● ans

Taliban Membuat Aturan Perjalanan untuk Para Wanita

KABUL (IM)- Otoritas Taliban melarang setiap wanita Afghanistan bepergian sejauh 72 kilometer (km) tanpa kerabat pria. Larangan ini diumumkan pada hari Minggu. Taliban menjadi penguasa di Afghanistan setelah mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021. Aturan baru untuk wanita, yang dikeluarkan oleh Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan, juga meminta semua pemilik kendaraan

untuk menawarkan tumpangan hanya kepada para wanita yang mengenakan jilbab.

“Wanita yang bepergian lebih dari 45 mil (72 kilometer) tidak boleh ditawarkan tumpangan jika mereka tidak ditemani oleh anggota [pria] keluarga dekat,” kata juru bicara kementerian, Sadeq Akif Muhajir kepada AFP, yang dilansir Senin (27/12).

Pedoman tersebut, yang diedarkan di jaringan media sosial, muncul beberapa minggu setelah kementerian itu meminta

saluran televisi Afghanistan untuk berhenti menayangkan drama dan sinetron yang menampilkan aktor wanita.

Kementerian juga telah meminta jurnalis televisi perempuan untuk mengenakan jilbab saat presentasi.

Muhajir mengatakan pada hari Minggu bahwa jilbab juga akan diperlukan bagi wanita yang mencari transportasi. Arahan kementerian juga meminta orang-orang untuk berhenti memutar musik di kendaraan mereka. In-

terpretasi Taliban tentang jilbab—jilbab dapat berkisar dari penutup rambut hingga cadar atau penutup seluruh tubuh—tidak jelas, dan mayoritas wanita Afghanistan sudah mengenakan jilbab. Sejak mengambil alih kekuasaan pada Agustus, Taliban telah memberlakukan berbagai pembatasan pada wanita dan anak perempuan, meskipun menjanjikan aturan yang lebih lunak dibandingkan dengan aturan mereka saat berkuasa pada 1990-an. Di beberapa provinsi, otoritas Taliban sempat telah dibujuk untuk membuka kembali sekolah—tetapi banyak anak perempuan masih terputus dari pendidikan menengah. Awal bulan ini, otoritas Taliban mengeluarkan dekret atas nama pemimpin tertinggi mereka yang memerintahkan pemerintah untuk menegakkan hak-hak perempuan. Keputusan itu tidak menyebutkan akses anak perempuan ke pendidikan. ● ans

Mantan Presiden Yunani Karolos Papoulias Wafat di Usia 92 Tahun

YUNANI (IM)- Politisi veteran Yunani Karolos Papoulias, yang menjabat sebagai presiden pada puncak krisis ekonomi tahun 2010-an, meninggal pada Minggu. Papoulias wafat dalam usia 92 tahun, kata kantor kepresidenan.

“Dengan kesedihan kami menyampaikan salam terakhir kami kepada Karolos Papoulias,” kata Presiden Katerina Sakellaropoulou dalam sebuah pernyataan, berterima kasih kepadanya karena “dengan kuat mempertahankan kohesi sosial dan persatuan nasional”, seperti dilansir dari AFP, Senin (27/12).

Papoulias menghabiskan satu dekade sebagai presiden setelah terpilih pada 2005 dan terpilih kembali pada 2010, selama krisis yang menjerumuskan negara itu ke dalam gejolak politik dan ekonomi paling parah dalam beberapa dekade terakhir.

Popularitasnya mengalami pukulan besar karena mendukung langkah-langkah penghematan yang didiktekan oleh pemberi pinjaman internasional dengan imbalan bailout, yang memicu protes kekerasan. Pada Oktober 2012, para

demonstran memblokir parade nasional di Thessaloniki dan meneriakkan “pengkhianat” di Papoulias.

Sebelum berjalan keluar dari pawai, Papoulias mengatakan kepada wartawan: “Kami berjuang untuk Yunani. Saya adalah seorang pejuang perlawanan pada usia 15, berperang melawan Nazisme dan Jerman.”

Namun, ia menyerahkan gajinya dalam solidaritas dengan “pengorbanan rakyat”

Lahir di Ioannina di barat laut Yunani pada tahun 1929, ia adalah juara lompat galah nasional dan anggota tim bola voli nasional di masa mudanya.

Dia kemudian belajar hukum di Athena, Italia dan Jerman dan menjadi pengacara pada tahun 1963.

Selama kediktatoran Yunani 1967-1974 ia pergi ke pengasingan di Jerman dan menjadi salah satu pendiri Gerakan Sosialis Pan-Hellenic (Pasok), yang menjadi salah satu partai paling dominan di era pasca kediktatoran.

Seorang anggota Parlemen 1977-2000, ia dua kali menjabat sebagai menteri luar negeri di pemerintahan sosialis. ● gul

Paus Fransiskus Khawatir Rendahnya Angka Kelahiran di Italia

VATIKAN (IM) - Paus Fransiskus meratapi rendahnya angka kelahiran di Italia. Ia memperingatkan penurunan angka kelahiran akan menjadi ancaman bagi masa depan negara itu.

Badan Statistik Italia pada bulan ini melaporkan angka kelahiran negara itu pada tahun lalu mencapai titik terendahnya sejak unifikasi negara itu tahun 1861. Penurunan terjadi 12 tahun berturut-turut.

“Musim dingin demografi benar-benar mengkhawatirkan, setidaknya di sini, Italia,” kata Paus dalam misa mingguan di depan Basilika Santo Petrus, Senin (27/12).

“Tampaknya banyak orang yang sudah kehilangan harapan untuk memiliki anak, banyak kelahiran lebih memilih tidak memiliki anak atau hanya satu anak, ini tragedi, yang mana bertentangan dengan keluarga kami, negara kami, dan masa

depan kami,” tambahnya. Badan Statistik Italia ISTAT melaporkan tahun lalu terdapat 404.892 kelahiran. Turun 15.192 dibanding tahun 2019 lalu. Sementara pada tahun 2020 terjadi 746.146 kematian, populasi pun turun ke 59,3 juta jiwa.

ISTAT mengatakan penurunan angka kelahiran berlanjut pada tahun ini. Mereka menambahkan pandemi Covid-19 salah satu faktor terjadinya penurunan. ● tom



JELANG PERAYAAN TAHUN BARU DI NEW YORK CITY - AS

Para pekerja menambah angka 2 ke tempat angka di atas Times Square menjelang perayaan Tahun Baru di Manhattan, New York City, Amerika Serikat, Minggu (26/12).



BERENANG DI AIR ES DANAU BOYARSKOYE - RUSIA Anggota klub renang musim dingin lokal berpartisipasi dalam acara berenang di air es danau Boyarskoye di luar Tomsk, Rusia, Minggu (26/12).

Kim Jong-Un Dikabarkan Punya Tim Pembunuh Warga yang Rayakan Natal

PYONGYANG (IM) - Rezim Korea Utara (Korut) di bawah pemimpinnya Kim Jong-Un dikabarkan mengerahkan tim pembunuh yang diperintahkan untuk memburu dan membunuh setiap warga Korut yang kedatangan merayakan Natal. Seperti dilansir Express.co.uk, Senin (27/12), Korut diketahui melarang setiap kepercayaan dan keyakinan lainnya, selain menyembah dinasti Kim yang memimpin negara komunis tersebut. Situasi itu memaksa warga penganut Kristen di Korut untuk menjalankan aktivitas keagamaan secara sembunyi-sembunyi.

Tidak hanya itu, tanggal 24 Desember setiap tahunnya juga ditetapkan sebagai perayaan untuk Kim Jong-Suk, istri dari pendiri Korut, mendiang Kim Il-Sung, atau kakek Kim Jong-Un. Timothy Cho, salah satu warga Korut yang berhasil kabur dari Korut, menuturkan bahwa setiap warga Kristen yang kedatangan mempraktikkan keyakinannya akan ditembak langsung oleh tim pembunuh yang diutus Kim Jong-Un.

“Saya yakin mereka akan diburu. Itu tidak diragukan. Rezim Kim akan mendesak orang-orang untuk menunjukkan loyalitas sepenuhnya kepada keluarga Kim,” tutur Cho kepada Express.co.uk. Cho kini bekerja untuk Open Doors, yayasan yang membantu warga Kristen yang menjadi korban persekusi. “Selama periode waktu ini, jika siapa saja ditangkap karena diam-diam merayakan Natal, mereka bisa langsung dibunuh,” ungkapnya. Cho dalam pernyataannya juga mengklaim bahwa kelahiran Kim Jong-Il, ayah Kim Jong-Un, menjadi mitologi untuk mereplikasi kelahiran Kristus. Korut disebut berada di peringkat teratas dalam daftar pengawasan persekusi Open Doors. Diperkirakan ada sekitar 400 ribu warga Kristen di Korut yang harus menyembunyikan keyakinan mereka dari rezim yang memata-matai. Namun demikian, dilaporkan banyak warga Kristen yang dikirimkan ke penjara-penjara barbar dan kamp kerja paksa karena keyakinan mereka. Pihak Open Doors memperkirakan ada sekitar 50 ribu - 70 ribu warga Kristen di Korut yang kini ditahan. ● gul